

## URGENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAH DI ERA EKONOMI MODERN

**Meiyanda Tri Pratiwi<sup>1</sup>**

[meiyandatripratiwi@gmail.com](mailto:meiyandatripratiwi@gmail.com)<sup>1</sup>

**Ummi Nur Khalijah<sup>2</sup>**

[umminasution24@gmail.com](mailto:umminasution24@gmail.com)<sup>2</sup>

**Putri Humairah<sup>3</sup>**

[humairahputri78@gmail.com](mailto:humairahputri78@gmail.com)<sup>3</sup>

**Ahmad Nur Fadly<sup>4</sup>**

[ahmadnurfadly7@gmail.com](mailto:ahmadnurfadly7@gmail.com)<sup>4</sup>

**Delima Sari Lubis<sup>5</sup>**

[delimasarilubis@uinsyahada.ac.id](mailto:delimasarilubis@uinsyahada.ac.id)<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan

### ABSTRACT

*Educational planning in the modern economic era faces increasingly complex challenges, including inequality of access, high funding, and degradation of moral values in the education system. This article examines the urgency of implementing sharia-based educational planning as a holistic and equitable alternative solution. Using a literature study method, this study highlights the importance of integrating sharia economic principles such as justice, transparency, and sustainability in education management, starting from curriculum planning, zakat and waqf-based funding, to character building of students. The results of the study indicate that a sharia-based education system can be an effective strategy in creating inclusive, moral, and sustainable education. However, its implementation still faces obstacles such as low sharia economic literacy, lack of policy support, and minimal synergy between educational institutions and sharia finance. Therefore, a collaborative approach is needed between the government, society, and sharia financial institutions to realize an education system that not only educates but also forms a generation with integrity amidst global economic challenges.*

**Keywords:** *Financial Planning, Educational Planning, Modern Economics, Islamic Economics.*

### ABSTRAK

Perencanaan pendidikan di era ekonomi modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk ketimpangan akses, pembiayaan yang tinggi, dan degradasi nilai moral dalam sistem pendidikan. Artikel ini mengkaji urgensi penerapan perencanaan pendidikan berbasis syariah sebagai solusi alternatif yang holistik dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pendanaan berbasis zakat dan wakaf, hingga pembentukan karakter peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan berbasis syariah dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, bermoral, dan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti

rendahnya literasi ekonomi syariah, kurangnya dukungan kebijakan, dan minimnya sinergi antara lembaga pendidikan dan keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi keuangan syariah untuk merealisasikan sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk generasi berintegritas di tengah tantangan ekonomi global.

**Kata Kunci:** Perencanaan Keuangan, Perencanaan Pendidikan, Ekonomi Modern, Ekonomi Islam.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial yang cepat, tantangan dalam perencanaan pendidikan semakin kompleks. Setiap negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat bersaing dalam perekonomian global. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi lebih dari sekedar alat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, melainkan juga menjadi sarana untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika, khususnya dalam kerangka ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan berkualitas, yang mengarah pada kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perencanaan pendidikan. Prinsip ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keberlanjutan, transparansi, dan menghindari praktik-praktik riba, yang sejalan dengan tujuan utama pendidikan

dalam Islam, yaitu mempersiapkan individu yang memiliki moralitas yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun, meskipun pendidikan berbasis syariah memiliki relevansi yang kuat, implementasinya dalam perencanaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor pendidikan, baik pada tingkat kebijakan pemerintah maupun di lembaga pendidikan itu sendiri. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kurikulum dan pengelolaan dana pendidikan, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang holistik dan berkeadilan.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam merencanakan pendidikan bagi anak-anak mereka. Di era ekonomi modern, biaya pendidikan yang semakin tinggi menuntut adanya perencanaan keuangan yang matang. Dalam hal ini, konsep keuangan syariah menawarkan solusi pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti melalui wakaf pendidikan, zakat, atau tabungan syariah. Namun, pemahaman yang terbatas mengenai

instrumen keuangan syariah ini menyebabkan banyak keluarga dan lembaga pendidikan kesulitan untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Pendidikan tinggi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dapat mempersiapkan lulusan untuk menghadapi dunia kerja dengan integritas tinggi, yang menjadi sangat penting dalam era ekonomi modern yang sarat dengan tantangan etika dan moral. Oleh karena itu, pendidikan berbasis syariah perlu diintegrasikan lebih dalam dalam perencanaan pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kemampuan teknis tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Melihat kondisi ini, urgensi perencanaan pendidikan berbasis syariah di era ekonomi modern menjadi sangat penting. Pendekatan pendidikan yang berbasis pada prinsip syariah dapat memberikan solusi terhadap ketimpangan akses pendidikan yang adil, pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, dan pembentukan karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perencanaan pendidikan berbasis syariah tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data, peneliti akan mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumendokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang mendalam mengenai perencanaan pendidikan berbasis syariah di era ekonomi modern dan untuk memahami urgensinya dalam konteks pendidikan dan ekonomi syariah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah proses merancang, mengatur, dan mengelola sumber daya serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari pengelolaan kurikulum, fasilitas pendidikan, pengembangan tenaga pengajar, hingga penyediaan dana untuk pendidikan itu sendiri. Tujuan utama dari perencanaan pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien, efektif, dan inklusif, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di masa depan. Perencanaan pendidikan dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi Kebutuhan Pendidikan, hal ini melibatkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

2. Penentuan Tujuan Pendidikan, dengan menetapkan tujuan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang yang ingin dicapai, baik itu dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter.
3. Penyusunan Kurikulum dan Program, yaitu erancang materi ajar dan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan peserta didik.
4. Penyediaan Sumber Daya, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, baik itu fasilitas fisik (sekolah, laboratorium, perpustakaan), tenaga pengajar yang kompeten, maupun dana pendidikan yang memadai.
5. Evaluasi dan Pengawasan, dengan melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam konteks pendidikan umum, perencanaan pendidikan mencakup seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta memperhatikan aspek administratif, akademis, dan sosial. Perencanaan yang baik akan membantu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global.

Perencanaan pendidikan berbasis syariah adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan. Hal ini tidak hanya mencakup

pengelolaan keuangan, tetapi juga pengembangan kurikulum, pelatihan tenaga pengajar, serta pemberian akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan berbasis syariah adalah:

#### 1) Pengelolaan Keuangan Pendidikan Berbasis Syariah

Salah satu hal yang paling mendasar adalah pengelolaan dana pendidikan. Pendanaan pendidikan berbasis syariah dapat memanfaatkan instrumen seperti zakat, wakaf, dan dana abadi pendidikan. Zakat digunakan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, wakaf digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung dan fasilitas lainnya, sementara dana abadi pendidikan dapat digunakan untuk mendukung kelangsungan operasional pendidikan dalam jangka panjang.

#### 2) Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akses Pendidikan

Salah satu tujuan utama perencanaan pendidikan berbasis syariah adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa semua anak, terutama dari keluarga miskin atau marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

#### 3) Kurikulum yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Islam

Dalam perencanaan pendidikan berbasis syariah, kurikulum pendidikan harus memuat materi yang tidak hanya mengajarkan keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini

meliputi pengajaran tentang etika Islam, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

#### 4) Pengembangan Tenaga Pengajar yang Berkualitas dan Berintegritas

Guru atau tenaga pengajar yang terlibat dalam pendidikan berbasis syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pengajaran. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pendidikan berbasis syariah.

#### 5) Evaluasi dan Pengawasan yang Transparan

Pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam memastikan bahwa dana pendidikan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi berkala terhadap keberhasilan program pendidikan berbasis syariah juga diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuan untuk mencetak individu yang kompeten dan berbudi pekerti luhur.

Perencanaan pendidikan berbasis syariah diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis tetapi juga membentuk karakter dan moral yang kuat pada peserta didik.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup aspek moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi keadilan (adil), transparansi (shafaf), dan keberlanjutan (istiqomah). Prinsip

keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek transaksi ekonomi, baik dalam distribusi kekayaan, pembagian keuntungan, maupun perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti konsumen dan pekerja. Transparansi menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk dalam pengelolaan dana zakat, wakaf, dan keuangan pendidikan. Sementara itu, keberlanjutan dalam ekonomi syariah berarti mendorong kegiatan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks pendidikan, ekonomi syariah dapat diterapkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Salah satu penerapannya adalah melalui pembiayaan pendidikan dengan zakat dan wakaf. Zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa kurang mampu, sedangkan wakaf digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas, atau beasiswa berkelanjutan. Selain itu, dana pendidikan juga dapat dihimpun melalui instrumen investasi syariah, seperti sukuk atau saham syariah, guna mendukung pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, serta memberikan peluang yang setara bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

### **Urgensi Integrasi Ekonomi Syariah dalam Perencanaan Pendidikan**

Urgensi integrasi ekonomi syariah dalam perencanaan pendidikan menjadi semakin penting di tengah dinamika sosial-

ekonomi yang kompleks di era modern. Ketimpangan ekonomi yang semakin tajam telah menciptakan kesenjangan akses terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, biaya pendidikan yang terus meningkat kerap menjadi penghalang utama bagi kelompok masyarakat tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, solidaritas sosial, dan distribusi kekayaan secara merata melalui instrumen zakat, infaq, dan wakaf dapat menjadi solusi nyata untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain persoalan akses dan pembiayaan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah degradasi nilai moral dalam sistem pendidikan. Pendidikan modern sering kali lebih menekankan pada pencapaian akademik dan keterampilan teknis, namun mengabaikan pembentukan karakter dan etika. Integrasi ekonomi syariah dalam perencanaan pendidikan tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual dan moral yang sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Islam, yaitu membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penggabungan antara sistem pendidikan dan prinsip ekonomi syariah merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mencetak generasi yang berintegritas, amanah, dan bertanggung jawab secara sosial.

### **Strategi Perencanaan Keuangan Pendidikan Berbasis Syariah**

Strategi perencanaan keuangan pendidikan berbasis syariah merupakan upaya

untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf. Zakat dapat diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan, khususnya dalam membantu siswa dari kalangan tidak mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan yang layak. Sementara itu, wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, hingga beasiswa berkelanjutan, sehingga institusi pendidikan dapat terus berjalan tanpa harus bergantung pada dana komersial.

Selain itu, penting untuk merancang model anggaran yang sepenuhnya bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah yang transparan dan adil dalam proses pengumpulan maupun alokasi dana pendidikan. Salah satu inovasi yang relevan dalam konteks ini adalah pengembangan dana abadi pendidikan berbasis syariah (*Islamic Endowment Fund*), yaitu dana yang dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang.

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui berbagai produk seperti tabungan pendidikan syariah, pembiayaan murabahah untuk pengadaan sarana belajar, serta investasi pendidikan berbasis sukuk. Kolaborasi antara institusi pendidikan, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah akan memperkuat fondasi ekonomi pendidikan dan menjadikannya lebih mandiri serta berkelanjutan tanpa

melanggar prinsip syariah. Dengan strategi ini, diharapkan pendidikan tidak hanya menjadi hak segelintir kalangan, tetapi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Implementasi Perencanaan Pendidikan Berbasis Syariah di Era Ekonomi Modern**

Implementasi perencanaan pendidikan berbasis syariah di era ekonomi modern dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis dan kolaboratif yang konkret. Pertama, lembaga pendidikan perlu membentuk unit khusus pengelolaan dana syariah yang bertugas mengoptimalkan sumber-sumber dana seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Unit ini berfungsi sebagai pengelola keuangan yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendanaan operasional, tetapi juga menjamin bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pembangunan sarana prasarana pendidikan dapat didanai dari wakaf produktif yang dikelola secara profesional dan transparan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kedua, lembaga pendidikan juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan program tabungan pendidikan syariah bagi orang tua atau calon mahasiswa. Selain itu, pembiayaan pendidikan syariah berbasis akad murabahah atau ijarah dapat menjadi solusi untuk siswa yang membutuhkan bantuan tanpa terjebak dalam praktik riba. Ketiga, dalam aspek perencanaan kurikulum, pendidikan berbasis syariah dapat diimplementasikan dengan memasukkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam

pembelajaran, seperti etika bisnis Islam, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial.

Terakhir, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis syariah. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan insentif bagi lembaga pendidikan yang mengembangkan model keuangan berbasis syariah, sementara masyarakat diharapkan turut berkontribusi melalui kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Implementasi ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

### **Tantangan dan Solusi Implementasi Perencanaan Pendidikan Berbasis Syariah di Era Ekonomi Modern**

Meskipun perencanaan pendidikan berbasis syariah menawarkan konsep yang holistik dan solutif, implementasinya di era ekonomi modern tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat serta pengelola pendidikan mengenai prinsip ekonomi syariah. Banyak institusi pendidikan masih terjebak dalam sistem keuangan konvensional karena keterbatasan wawasan terhadap alternatif syariah. Selain itu, minimnya regulasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi hambatan dalam mendorong transformasi keuangan pendidikan yang sesuai syariah, terutama dalam hal pemanfaatan zakat dan wakaf secara produktif untuk sektor pendidikan.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan syariah di lembaga pendidikan,

baik dari segi manajemen wakaf maupun instrumen pembiayaan syariah. Kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga keuangan syariah juga memperlambat pelaksanaan program-program pendanaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, masyarakat umum masih memerlukan edukasi yang memadai agar mereka percaya dan aktif berpartisipasi dalam mendukung pendidikan melalui instrumen seperti wakaf tunai, zakat pendidikan, dan investasi syariah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif. Solusi pertama adalah meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan pengelola pendidikan, baik melalui pelatihan, seminar, maupun integrasi materi ekonomi Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada prodi ekonomi syariah. Kedua, pemerintah dan otoritas zakat/wakaf perlu merancang regulasi yang mendukung pemanfaatan dana sosial Islam untuk pendidikan, serta menyediakan insentif bagi lembaga yang mengembangkan model keuangan berbasis syariah. Ketiga, perlu dikembangkan model kemitraan antara lembaga pendidikan dan institusi keuangan syariah untuk menyediakan produk-produk pembiayaan pendidikan yang mudah diakses dan sesuai syariah. Terakhir, edukasi publik yang berkelanjutan tentang pentingnya peran zakat, infaq, dan wakaf dalam pendidikan akan mendorong partisipasi umat dalam membangun sistem pendidikan Islam yang adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan berbasis syariah memiliki urgensi yang tinggi di era ekonomi modern,

mengingat tantangan-tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, meningkatnya biaya pendidikan, serta menurunnya nilai moral dalam sistem pendidikan saat ini. Konsep ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menawarkan solusi alternatif yang holistik, tidak hanya dalam hal pembiayaan, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan orientasi sosial pendidikan.

Di tengah dominasi sistem keuangan konvensional dan tingginya komersialisasi pendidikan, perencanaan pendidikan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah seperti sukuk pendidikan serta dana abadi wakaf menjadi alternatif nyata dalam membiayai pendidikan tanpa melibatkan unsur riba. Selain itu, penerapan prinsip syariah juga menjadi cara untuk membentuk lingkungan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan intelektual, tetapi juga membangun spiritualitas dan akhlak mulia.

Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi ekonomi syariah, minimnya SDM yang kompeten, hingga belum optimalnya sinergi antara lembaga pendidikan dan institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, urgensi tersebut menuntut adanya strategi yang terencana, kolaboratif, dan didukung oleh regulasi yang kuat, agar sistem pendidikan berbasis syariah dapat benar-benar diterapkan secara luas dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri, dan Patta Rapanna. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ>.
- Ahdar, Musyarif. “Tantangan Pendidikan Islam di Indonesia pada era globalisasi.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2019): 13–30.
- Bawazir, Fuad, M Aditya Ananda, dan Lia Murlisa. “Peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syari’ah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 139–50.
- C., Taufani, dan Kurniatun. *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Bumi Aksara, 2025. <https://books.google.co.id/books?id=G MJVEQAAQBAJ>.
- Hairiyah, Hairiyah, Aida Hayani, dan Ika Tri Sulsilowati. “Degradasi Moral Pendidikan Di Era Modernisasi Dan Globalisasi.” *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2022): 162–76.
- Hidayah, Nurul, Ahmad Ridwan, dan Abdul Azis. “Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Modern.” *Jurnal Al-Fatih* 7, no. 2 (2024): 209–28.
- Johan, Budi, Farah Miftahul Husnah, Alfianti Darma Puteri, Hartami Hartami, Ahda Alifia Rahmah, dan Anzili Rahma Jannati Adnin. “Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 13.
- Mubin, Fatkhul. “Pengertian, Unsur, Prinsip dan Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan,” 2020.
- Rizka Auliya, Sovia. “Pengertian, Urgensi Dan Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan Islam.” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 222–31.
- Safina, Safina, Nur Fitri Hidayanti, Zaenafi Ariani, Novi Yanti Sandra Dewi, Ahadiyah Agustina, dan Nur’ani Nur’ani. “Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah.” In *Seminar Nasional Paedagoria*, 4:236–48, 2024.
- Syafrudin, U, dan Ridwan Widagdo. “Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Kontek Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Kurikulum Jurusan Perbankan Syari’ah.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah* 8, no. 2 (2016).
- Widjaya, Muhammad Angka, dan Muhammad Iqbal Fasa. “Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7429–42.
- Yumarni, Ani, dan Hidayat Rumatiga. “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba’ dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4310–30.

